BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan media pertanggung jawaban kinerja keuangan keadan pengguna. Sehingga diharapkan pemerintah dapat memberikan laporan keuangan yang berkualitas agar isi dalam kandung dapat dipahami oleh publik dan memunculkan kepercayaan yang baik oleh masyarakat terhadap pemerintah. Isi laporan berkualitas juga harus memliki unsur seperti relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Didalam organisasi laporan keuangan keuangan tidak hanya ada disektor private saja namun dalam sektor publik juga diberlakukan penyusunan laporan keuangan. Pelaporan ini diberlakukan agar Pemerintah mengetahui pertanggung jawaban dan penganggaran dana yang diberlakukan diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbentuk pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian mengenai pentingnya laporan keuangan telah dilakukan oleh Wienfield (1978) ,Chang dan Mos (1985) , Boyne dan Law (1991) yang berpendapat bahwa laporan tahunan penting sebagai alat memperkuat akuntanbilitas, Marston dan Shrives (1991) menyimpulkan bahwa laporan keuangan ialah dokumen paling komperhensif yang utama bagi publik dan sebagai alat pengungkap utama, Parker (1982) juga menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan media komunikasi masa meskipun laporan keuangan

bukanlah sumber utama informasi tentang kinerja organisasi, tetapi dapat dipandang sebagai sumber utama karena mencakup dan ketersediaannya , informasi yang dikomunikasikan kepada stakeholder melalui laporan keuangan tahunan merupakan fokus dari riset yang adalah alat kerangka kerja dari akuntanbilitas publik (Coy et al , 2002 : Hooks et al , 2002)

Disamping itu Pemerintah mengatur sebuah kebijakan mengenai Sistem Otonomi Daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya seperti kepentingan masyarakat serta perundang undangan didaerah itu sendiri. Dengan adanya sistem Otonomi daerah diharapkan agar masyarakat dalam mengatur dan mengelolah keuangan daerahnya sendiri. Pemerintah diminta masyarakat untuk menampilkan laporan keuangan yang baik agar dapat mewujudkan cita cita pemerintah yang bersih karena pengelolaan keuangan yang baik berasal dari kemampuan mengontrol keuangan secara ekonomis, efisien, akuntabel , dan transparan. Karena seiring perkembangan jaman Pemerintah Daerah mendapatkan tuntutan umum mengenai informasi dan kinerjanya terhadap masyarakat laporan keuangan sendiri juga sebagai media untuk masyarakat melihat pengelolaan dana mulai dari pajak retribusi atapun transaksi yang dilakukan pemerintah itu sendiri.

Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat syang menjelaskan tentang pertangung jawaban dan amanat atas pelaporan keuangan sendiri seperti :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : " Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Dilihat dari ayat diatas dapat dijelaskan jika pemerintah berkewajiban untuk menerbitkan laporan keuangan yang rill tanpa ada kecurangan didalamnya. Oleh karena itu jika terdapat isi laporan keuangan yang buruk atapun terjadi kesalahan yang fatal akan berimbas buruk terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Seperti banyaknya ditemukan kesalahan didalam isi laporan tersebut karena banyak data yang tidak sesuai . Badan Pemeriksaan Keuangan sendiri menemukan banyaknya penyimpangan penyimpangan yang ada ketika melakukan audit Laporan Keuangan Pemerintah. Sehingga permasalahan ini cukup menarik untuk dikaji lebih lanjut untuk mendapatkan Pemerintahan yang baik(Good Governance). Sebagian peneliti , termasuk literlatur pelaporan keuangan sektor public telah melakukan penelitian mengenai perubahan sistem akutansi telah mengadopsi dasar teoritis yang berbeda dengan cara pandang yang berbeda juga. Pendekatan teoritis menunjukan tidak ada keterbatasannya penjelasan teori tersebut. Sehingga terdapat kesempatan untuk mengeksplorasi metode penelitian

yang mampu mempengaruhi dinamika dalam perubahan sistem akuntansi dalam kontek tertentu. (Joanne Lye , et all 2005)

Dapat dilihat salah satu bentuk pertanggung jawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Upaya konkrit dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan. Akuntansi dimata Pemerintah memiliki peran penting karena menjadi subjek dalam informasi dan pengungkapan atas kinerjanya dalam aktivitas finansial. Seperti yang disampaikan Suwardjono ,

Laporan keuangan harus mencakup manfaat yang bernilai karena sebagai pertimbangan untuk pengambilan keputusan ketika pemerintah menerbitkan laporan keuangan(2005). Pada Pasal 33, Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 terdapat perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, meteri keuangan mendapatkan hak untuk menunda alokasi dana umum yang akan disalurkan kedaerah dikarenakan laporan keuanga yang belum diserahkan, penundaan juga belaku ke anggaran pendapatan dan belanja daerah. Secara tidak langsung keadaan tersebut mengindikasi bahwa laporan keuangan pemerintah belum sepenuhnya memenuhi kriteria yang relevan dan andal karena pada umumnya kedua unsur tersebut penentu dalam kualitas laporan keuangan yang

sangat mempengaruhi informasi dalam pengambilan keputusan (Mardiasmo,2006). Penyusunan Laporan Keuangan yang baik berpedoman pada Standar Akutansi Pemerintah (SAP) yang diatur dialam Peraturan Pemerintah no71 Tahun 2010 yang dimaksudkan dalam menyusun pelaporan keuangan dari hasil penerapan SAP memberi manfaat bagi pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah dibandingan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal tersebut sebanding dengan salah satu prinsip akutansi yaitu biaya yang dikeluarkan sesuai dengan manfaat yang diperoleh (PP no 71 Tahun 2010).

Walaupun Kabupaten Semarang mendapat predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) selama4 kali berturut turun dalam kurun waktu 2013 – 2017 namun pada tahun 2017 BPK memaparkan adanya 9 temuan yang terkemas dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang. Dimana 9 temuan tersebut merupakan hasil pemeriksaan atas dasar standar penilaian internal (SPI) . Tidak hanya itu BPK juga menemukan sekitar 8 temuan ketgori yang tidak patuh dengan perundang undangan. Selain itu masih ditemukan juga kelebihan pembayaran yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah yaitu di Dinas Pendidikan, kebudayaan , Kepemudaan dan Olah Raga(Disdikbudpora) Kabupaten Semarang. Kelebihann pembayaran tunjangan profesi guru yang mencapai Rp. 90.177.785. Kelebihan pembayaran juga terjadi pada kegiatan belanja modal pada 6 OPD yang berada pada Kabupaten Semarang yang totalnya mencapai mencapai Rp. 230.237.674.89. Adanya perjanjian antara

Dinas Lingkungan Hidup dengan PDAm Kabupaten Semarang mengenai pemungutan retribusi sampah juga tidak sesuai denganketentuan. Sesuai dengan PP no 6 tahun 2010 PDAM hanya bisa mengambil retribusi sebanyak 5 persen namun pada kenyataannya perusahaan terkait meminta sebesar 10 persen. Terdapat keterlambatan pembayaran klaim denda oleh BPJS pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ambarawa Rp. 48.275.612 dan RSUD Rp 139.505.915 di RSUD Ungaran . dan masih banyak permasalahan permasalahannya yang lainnya sehingga sejauh ini eksekutif belum mampu menjalankan fungsinya sesuai UU . Oleh karena itu BPK menilai masih ada sebagian kinerja yang belum patuh terhadap perundang undangan . Karena BPK masih banyak menemukan hal tersebut di sepanjang Tahun Anggaran 2017.

Dari isu yang tekait dengan penelitian ini masih banyak ditemukannya ketidakwajaran dalam penyajian laporan keuangan. Dan hal ini dibuktikan pada penelitian Nurais (2017) membuktikan secara empiris bahwa tingkatan penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keungan daerah, sistem pengendalian intern pemerintah, dan kopetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang di mana studi kasus di Banjarnegara jawa tengah, berbeda dengan penelitian ini terdapat pengaruh lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu standar akuntansi pemerintah yang dimana laporan keuangan yang dibuat harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, dan juga dengan adanya penerapan good

governance yang dimana kualitas laporan yang baik itu yang menggambarkan pertanggung jawaban yang baik mencerminkan pemimpinan dalam sebuah entitas itu baik sesuai dengan tujuannya serta perbedaan lainnya terletak pada lokasi dan sampel penelitian. Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti **"Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, *Good Governance*, Sistem Pengendalian Intern Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan"** yang menjadi tolak ukur dalam penelitian ini untuk mengetahui apa saja yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan, maka dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi sebuah entitas dalam pengambilan keputusan.

Dalam penelitian ini juga memotivasi peneliti untuk memecahkan masalah yang ada tentang ketidak konsistenan hasil dalam penelitian-penelitian sebelumnya maka dengan adanya penelitian ini untuk mengetahui pengaruh standar akuntansi pemerintah, *Good Governance*, sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan dan dalam penelitian ini akan melihat studi kasus yang ada organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Semarang

Pengaruh Standar Akutansi Pemerintah (SAP) begitu penting dalam mencptakan kualitas laporan keuangan yang baik sehingga pertanggungjawaban pemerintah akan terasa semakin tinggi terhadap masyarakat berkaitan dengan penggunaan anggaran dan pelaksanaan kinerja pemerintah. SAP sendiri bertujuan

untuk mengatur penyusunan dalam laporan keuangan yang dalam tujuan umumnya meningkatkan keterbandingann laporan keuangan yang baik terhadap anggaran antar periode ataupun dengan antar entitas. Menurut Jeffrey L Esser (1992) menganalisis mengenai "GASB's implementation of new measurement focus and basic on accounting: yang menunjukan bahwa perubahan pada Standar Akuntansi Pemerintah yang merupakan dasar dalam pelaporan keuangan akan terakses pada penurunan kredibilitas laporan keuangan pemerintah dan kemampuannya untuk dipahami oleh para pengguna khususnya entitas pelaporan yang belum menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah belum sepenuhnya. Sesuai dengan pendapat Heni Nurani H (2008) bahwa standar akutansi ialah standar ataupun panduan yang digunakan pemerintah dalam mengelola keuangan Negara atas bentuk pertanggungjawaban pemerintah yang menyajikan informasi keuangan berkualitas (Oktarina, 2016) mengungkapkan bahwa Laporan keuangan yang berkualitas ditunjukkan dengan kepada daerah yang mampu bertanggung jawab dengan wewenang yang diberikan kepadanya

B. Rumusan Masalah

Sesuai yang sudah dijelaskan didalam latar belakang sebelumnya maka rumusan masalah untuk penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Standar Akutansi Pemerintah Daerah Organisasi Perangkat Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

2. Apakah Sistem Pengendalian Internal pada Organisasi Perangkat Daerah berpengaruh positif Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
3. Apakah penetapan *Good Governance* pada Organisasi Perangkat Daerah Kab. Semarang berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
4. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Organisasi Perangkat Daerah Kab Semarang berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan isi rumusan masalah sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji Pengaruh Standar Akutansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah terhadap Kualitas laporann Keuangan Pemerintah Daerah
2. Untuk menguji pengaruh *Good Governance* Organisasi Perangkat Daerah terhadap Kualitas laporann Keuangan Pemerintah Daerah
3. Untuk menguji pengaruh Sistem Pengendalian Internal Organisasi Perangkat Daerah terhadap Kualitas Laporann Keuangan Pemerintah Daerah
4. Untuk menguji pengaruh Kompetensi Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah terhadap Kualitas laporann Keuangan Pemerintah Daerah

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Bidang Teoritis
   a. Penambah wawasan dalam pengetahuan dan pengembangan ilmu seputa Akutansi Sektor Publik bagi penulis
   b. Penambah bukti empiris dan pengetahuan untuk bidang akutansi sektor publik bagi akademis

c. Untuk peneliti selanjutnya dapat dijadikan referensi dalam pembuatan penelitiannya

d. Untuk pembaca dapat dijadikan penambah literature bacaan dan wawasan terutama kualitas laporan keuangan.

2. Bidang Praktik

a. Untuk Instansi Pemerintah Daerah dapat meningkatkan dan mempertahankan kualitas laporan keuangan, Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, *Good Governance*, Sistem Pengendalian Intern Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia.

b. Dapat dijadikan masukan atau saran dalam pemerintahan Kab Semarang mengenai kualitas laporan keuangan, Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Penerapan *Good Governance*, Sistem Pengendalian Internal Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia.